

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024–2026

PEMUTAHIRAN

(PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)



5 APRIL 2023

**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JOMBANG
2023**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun periode 2024–2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026. Berbagai tantangan dan harapan dalam kurun waktu 2024–2026 diakomodasikan dalam suatu perencanaan strategi, serta dipersepsikan dalam bentuk kebijakan. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga aktualisasi kebijakan strategi sebagai tindak lanjut dari rencana yang telah disusun, sangat perlu menjadi komitmen bersama untuk mencapai hasil optimal. Rencana strategis ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, sehingga pada tahun-tahun berikutnya semakin meningkat kualitas kawasan permukiman di Kabupaten Jombang. Selain itu, dokumen ini diharapkan juga dapat berfungsi sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan dalam penyusunan RENSTRA di tahun mendatang. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.

Jombang, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Jombang



AGUNG HARIADI. ST. MM

Pembina

NIP. 197011262002121006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman.....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman	23
2.4 Kelompok sasaran layanan.....	25
a. Mitra Dinas Perumahan Dan Permukiman Dalam Pemberiaan Pelayanan.	
b. Dukungan BUMN dalam pencapaian kinerja PD.	
c. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab PD.	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Permasalahan pelayanan PD	28
32. Isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,	
4.1 Tujuan dan sasaran Renstra PD Kabupaten tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada :	
a. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026.....	36
b. Norma, standar, prosedur dan kreteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah	40
4.2 Cascading kinerja PD mulai dari Tujuan, sasaran, outcame dan output serta indikatornya masing-masing	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman.....	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan,Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman	73

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstraPD 2024 – 2026 melalui indicator kinerja Utama (IKU) 82

7,2 Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2024-2026 melalui indicator kinerja kunci. IKK beserta targetnyabagi PD pemangku urusan 83

BAB IX PENUTUP..... 84

DAFTAR TABEL

Nomor	Nama Tabel	Halaman
2.1	Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III	9
2.2	Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV	9
2.3	Pegawai Jabatan Staf.....	10
2.4	Pembagian Aparatur berdasarkan Golongan.....	20
2.5	Pembagian Aparatur berdasarkan Eselon	20
2.6	Pembagian Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
2.7	Sumberdaya Sarana dan Prasarana	21
2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman...	24
2.8	SPM Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	26
3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	30
3.2	Isu-Isu Pembangunan	33
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	38
4.1	NSPK Dinas Perumahan Dan Permukiman.....	40
4.1	Cascading 050-5889	41
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	72
6.1	Nama Program Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024- 2026	73
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang	74
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM	82
8.1	Formula Perhitungan	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Jombang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Jombang 2024–2026, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD yang mendukung Bupati Jombang di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan permukiman, serta penyediaan prasarana sarana utilitas umum pada tingkat kabupaten sesuai per-undang-undangan dan pembangunan guna menuju pemerintahan yang berkarakter dan berdaya saing.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang serta disesuaikan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman disusun berpedoman pada RPJD sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.
- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 3 (tiga) tahun.
- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman.
- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman adalah acuan dalam penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal.
- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian PUPR.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Selain itu juga sebagai instrumen untuk **menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi** Dinas Perumahan

dan Permukiman. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang **tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**. Fungsi dari Renstra SKPD disusun guna mendukung penyempurnaan dokumen RPD. Rancangan Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Jombang memiliki urusan perumahan dan permukiman. Penyelenggaraan urusan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Proses penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026, memuat latar belakang, landasan hukum, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dengan **berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD)** Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026. Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Pertimbangan yang dipakai dalam pembuatan rencana strategis adalah lingkungan **eksternal dan internal**. Lingkungan eksternal yaitu program kepala daerah, kondisi objek urusan Dinas Perumahan dan Permukiman. Kemudian kondisi lingkungan regional yang merupakan penelaahan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman dengan renstra dinas terkait tingkat Provinsi Jawa Timur, selanjutnya lingkungan nasional yang berisi penelaahan dengan renstra kementerian dan lembaga terkait. Sedangkan lingkungan internal yaitu kondisi internal Dinas Perumahan dan Permukiman, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana, serta Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026.

Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 adalah bersifat **indikatif**, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026. Selanjutnya program tersebut dijabarkan kedalam rencana kegiatan yang meliputi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas

Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang dalam **menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan)** periode Tahun 2024–2026. Rencana strategis merupakan proses yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jombang dari Dinas Perumahan dan Permukiman.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007;
13. Permen PUPR No 13.1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonomi Baru
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri nomor; 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan invebtarisasi pemutahiran klasifikasi, kodevikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
20. Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Bupati Jombang No. 81 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang 2024–2026 dimaksudkan untuk mewujudkan sistem perencanaan dan pertanggung jawaban yang jelas, tegas dan legal sesuai komitmen bersama yang selaras dengan RPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam 3 (tiga) tahun ke depan.
- b. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Permukiman dan *stakeholder* dalam menentukan prioritas program tiga tahun ke depan (2024–2026) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas (Renja Tahunan Dinas).
- c. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024–2026 adalah:

1. Sebagai wujud penjabaran RPD Kabupaten Jombang 2024–2026 lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program dinas periode Tahun 2024–2026;
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja dinas tahunan;
4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jombang;
5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang kurun waktu 3 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang Tahun 2024–2026 disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematis penulisan

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen Renstra yang dimaksudkan agar substansi pada bab-bab berikutnya tergambarkan dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik.

BAB II. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

1. Tugas, fungsi dan struktur PD
2. Sumber Daya PD
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan (Yang mendapat layanan Dinas Perumahan dan Permukiman)

Dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti

- a. Mitra PD dalam pemberian pelayanan (apabila ada), misalnya Polsek, Koramil, merupakan mitra PD Kecamatan;
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD (apabila ada), misalkan PDAM sebagai unsur BUMD yang sering membantu Dinas Perumahan Dan Permukiman ..

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II) ; dan
2. Isu Strategis.

BAB IV. Tujuan dan Sasaran PD

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2024 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada;
 - a. Tujuan dan Sasaran rencana pembangunan daerah Tahun 2024-2026 ; dan atau
 - b. Norma, standart, prosedur dan kreteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai kewenangan daerah
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indicator masing- masing

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Menguraikan rencana strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan dan Permukiman yang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Menguraikan program dan kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagunya (nomenklatur program , kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peratruran menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Memuat ;

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra PD tahun 2024-2026 melalui indicator kinerja utama (IKU) PD, dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui indicator kinerja kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintah daerah

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman

Peraturan Bupati Jombang No. 48 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang.

Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Dinas Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di perumahan dan kawasan permukiman;

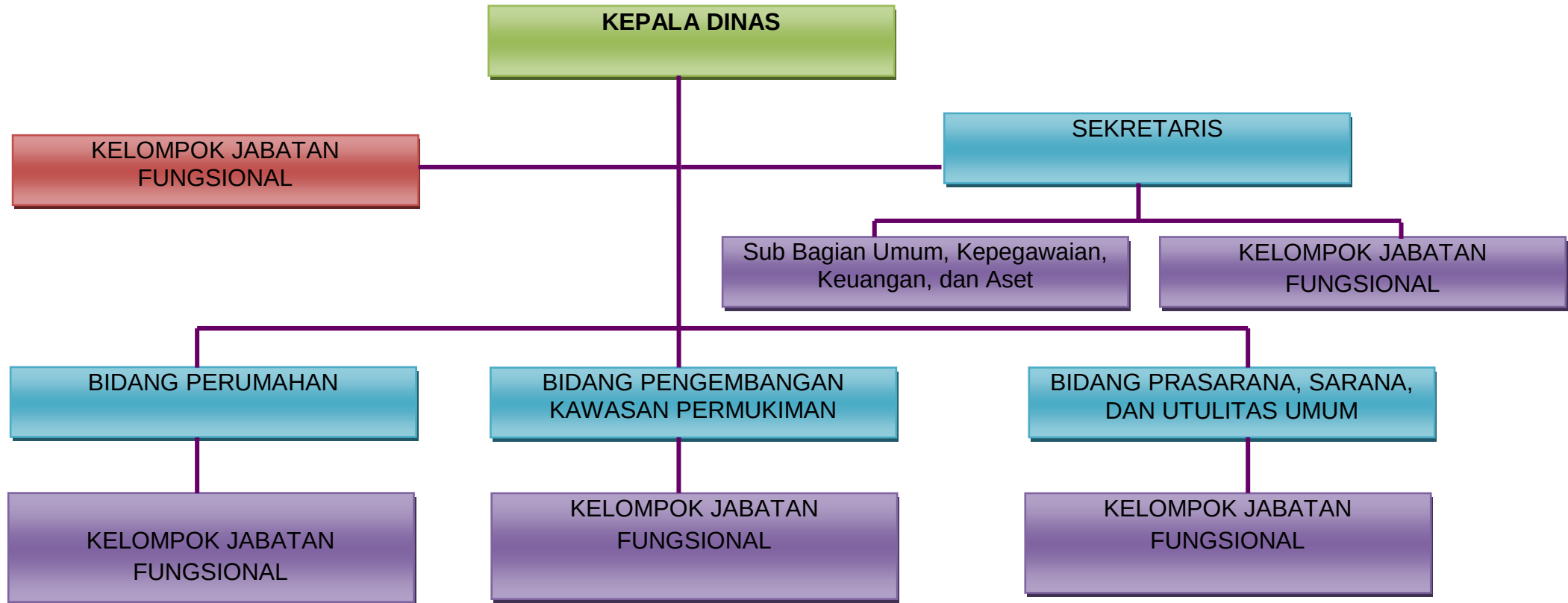
Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris, Membawahi :
 1. Sub Bagian Umum , Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Perumahan, membawahi :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, membawahi
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan susunan organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagaimana bagan dibawah ini:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG**



Rincian personil pegawai pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang saat ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket.
1	AGUNG HARIADI. ST. MM.	197011262002121006	Kepala Dinas	
2	SYAIFUL ANWAR, S.T	196605311997031002	Sekretaris	
3	SRI RAHAYU, S.T.	197211012001122002	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Utulitas Umum	
4	Ir. WILDAN BOEDI SANTOSO, M.Si.	'196609051992021000	Kepala Bidang Perumahan	
5	AHMAD ROFIQ AS'ARI S.T.	197705262001121003	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	

Tabel 2.2 Pegawai Jabatan Struktural Eselon IV Dan Jabatan Fungsional

No	Nama	NIP	Jabatan	Ket.
1	WIWIN SETYORINI. S.E.	198407062010012017	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	
2	ACHMAD BASOEKI	196801241991031004	Perencana Ahli Muda	
3	FADIYAH NUR AINI, S.T.	198212262015052001	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
4	MADYA PELITA NUSANTARA, S.T.	197905232011011004	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
5	OSSY PRASADANA, S.T.	198112182011010002	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
6	YUSWANTO, S.T.	198012242010011015	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
7	SAMSUL HUDA, S.H.	196708161989031012	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	
8	M. FACHRUNAZ IRFANI, S.T.	198810222015051001	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	
8	IRA WIJAYANTI HARRYANTO, S.T.	197710182006042015	Penata Ruang Ahli Muda	
10	LULUS SETYANINGSIH, S.T.	198303032011012006	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	

Tabel 2.3 Pegawai Jabatan Staf

No	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	DIDIK BUDIONO, S.T.	197312152001121002	Analisis Bangunan Dan Perumahan	
2	JOKO SETYOBUDI	196302051989091001	Pengadministrasi Persuratan	
3	SUNARIYATI	196906011990032014	Pengadministrasi Persuratan	
4	KUSPARTINI, S.Sos.	196508171986032019	Bendahara	
5	DJOKO UDI HARTONO	196901152007011012	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
6	TRISNO	197608152009011005	Pengelola Perumahan Dan Permukiman	
7	SURYONO	197002192001121002	Teknisi Air	
8	YULI SETYO PRIHATI, S.T.	198107112011012003	Analisis Perumahan	
9	ANANG PRIONO, A.Md.	198910182011011002	Analisis Infrastruktur	
10	KHOIRUL ANWAR	197111162008011001	Pengadministrasi Kepegawaian	
11	DEDIH RAHARJO	198405092009011004	Pengelola Data Pencairan Dana	
12	YETI HENDRAYANTI	197404252007012010	Pengadministrasi Keuangan	
13	SITI KHOLIFATUL MAGHFUROH, A. Md.	199503202020122007	Pengelola Pembangunan Dan Peningkatan Jalan	
14	SUKMA RAHAYU NILAMSARI, A. Md	199506202020122005	Pemeliharaan Bangunan	
15	VITASARI HIDAYANTI, A. Md.	199808142020122004	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	
16	MOHAMMAD RIZKI, A.Md	199112102022031003	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	

Guna melaksanakan tata pemerintahan yang efektif, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata laksana Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah No. 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas. Adapun tata laksana Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing;

- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Selanjutnya deskripsi mengenai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dijabarkan sebagai berikut.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Permukiman adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Perumahan dan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman;
- e. Penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman
- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi–fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga, serta penatalaksanaan keuangan ;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugasbidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan publik;
- h. Pengelolaan aset;
- i. Pengelolaan kearsipan;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan strategis dan pelaksanaan program, kegiatan dan realisasi anggaran secara terukur dan berkelanjutan; dan
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Keuangan (LK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkup Dinas

- m. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik
- n. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- o. Pelaksanaan koordinasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan Dinas Perumahan Dan Permukiman;
- g. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Standar Operasioanal Prosedur, Standar Pelayanan Publik dan inovasi pendukung kebijakan daerah;
- h. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas
- i. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur
- j. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran
- k. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran
- m. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor
- n. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perumahan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- d. Pelaksanaan pembinaan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan, penyediaan, dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan

- permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman khusus dan strategis; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik dan drainase;
- d. Pelaksanaan rekomendasi teknis pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan air bersih, air limbah domestik, dan drainase; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.
- (4) Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah 31 orang. Dari jumlah aparatur yang ada dapat dipaparkan pembagian sebagai berikut.

Tabel 2.2 Pembagian Aparatur berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1.	IV c	1 orang	1	0
2.	IV b	0 orang	0	0
3.	IV a	1 orang	1	0
4.	III d	7 orang	4	3
5.	III c	7 orang	4	3
6.	III b	3 orang	1	2
7.	III a	2 orang	1	1
8.	II d	4 orang	3	1
9.	II c	5 orang	2	3
10.	II b	1 orang	1	0
11.	II a	0 orang	0	0
12.	I d	0 orang	0	0
13.	I c	0 orang	0	0
	Jumlah	31 Orang	18	13

Tabel 2.5 Pembagian Aparatur berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah Pegawai	Laki-laki	Perempuan
1	I	-	-	-
2	II	1 Orang	1	0
3	III/a	1 Orang	1	0
4	III/b	3 Orang	2	1
5	JF Ahli Muda	11 Orang	6	5
	Jumlah	16 Orang	10	6

Tabel 2.6 Pembagian Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
1	S3	-	-	-
2	S2	2 orang	2	0
3	S1	16 orang	8	8
4	D4	-		
5	D3	5 orang	2	3
6	D2	-	-	-
7	D1	-	-	-
8	SMA sederajat	8 orang	6	2
9	SMP Sederajat	0 orang	0	0
10	SD Sederajat	0 orang	0	0
	Jumlah	31 orang	18	13

2.2.2. Sarana dan Prasarana Pokok

Sarana dan prasarana pokok merupakan barang-barang inventaris dari Dinas Perumahan dan Permukiman. Tujuan dari dianggarkannya sarana dan prasarana pokok ini adalah untuk mendukung kinerja dari pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman. Daftar dari nama barang dan jumlah dapat dijabarkan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7 Daftar Nama Barang dan Kondisi

NO	NAMA BARANG	KONDISI BAIK
I	KENDARAAN DINAS	
A	Mobil	
1	Station Wagon ISUZU / TBR 54 F 2008	1
2	Station Wagon SUZUKI / GC415V-APV DLX 2013	1
3	Station Wagon TOYOTA / New Innova G Diesel 2015	1
4	Pick Up TOYOTA / KF60 STD 2006	1
5	Pick Up ISUZU / TBR 54 PICUP TURBO 2012	1
B	Motor	
1	Sepeda Motor HONDA / NF 125D	13
2	Sepeda Motor HONDA / GL 160 D	2
3	Sepeda Motor HONDA / GL MG	1
4	Sepeda Motor HONDA / MCB	3
5	Sepeda Motor KAWASAKI / LX 150C (KLX 150S)	2
6	Sepeda Motor Gerobak Kaisar / Triseda XP Sedot WC	1
II	MEBELER	
1	Loader Lainnya Atlas Copco / LP6500	1
2	Pompa Air Simitzu	1
3	DrillHusqvarna / DMS 240	1
4	Global Postioning System Tribble / Juno 3 B	2
5	Alat Ukur Universal Lainnya	5
6	Air Conditioning Unit	3
7	Rak-Rak Penyimpanan	3
8	Mesin Tik	3
9	Almari Besi/Metal – Krisbow	2
10	Rak Besi / Metal – Krisbow	5
11	Filling Besi/Metal	8
12	Alat Penghancur Kertas	2
13	White Board	1
14	Lemari Kayu	8
15	Meja Kursi Kayu /Rotan	5
16	Kursi Besi / Metal	4
17	Meja Rapat	3
18	Kursi Rapat	10
19	Sofa	2
20	Meubelair Lainnya	1
21	Korden dan Rel Korden	5
III	PERALATAN KANTOR	
1	Jam Elecktronik	1
2	M.Penghisap Debu - Nilfisk / Multi 20	1
3	Alat Pembersih lainnya	3
4	Lemari Es LG / 212	1

NO	NAMA BARANG	KONDISI BAIK
5	Kipas Angin MASPION / PLASMA PCIPK	8
6	Televisi	3
7	Cassete Recorder POLYTRON	1
8	Sound System	1
9	Tangga Almunium	2
10	Handy Cam	1
11	Alat Rumah Tangga Lainnya	1
12	P.C. Unit ELITE	12
13	Lap Top Lenovo / ideapad Z480	7
14	Keyboard	12
15	Printer	28
16	Monitor	2
17	External Perlengkapan komputer Lainnya Toshiba	1
18	Peralatan Personal Komp. Lainnya	5
19	Server HP / ML 350p T08 E5_2609 LFF	1
20	Meja Tamu Ruang Tunggu Ketua/W	4
21	Meja - Kursi Kerja Pejabat Eselon li	1
22	Meja - Kursi Kerja Pejabat Eselon lii Rasio	1
23	Kursi Rapat Pejabat Quadra	1
24	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Sofa	1
25	Camera+Attachment	7
26	Proyektor+Attachment	6
27	Unintemuptible P.S.(Ups)	2
28	Peralatan Studio Visual	2
29	Concrete Hammer Test	2
30	Vacuum System	1
31	Theodolite	1

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan segala kegiatan dan program yang merupakan implementasi dari standar pelayanan minimal. Indikator yang menjadi acuan dalam menilai tingkat kinerja dari Dinas adalah standart pelayanan minimal itu sendiri beserta target capaian yang telah menjadi aturan dan penentuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut ini dipaparkan kinerja pelayanan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang sebagaimana tabel berikut ini :

Kinerja Pelayanan

SANITASI	Penyediaan sanitasi layak
	Fasilitasi dan pembangunan sanitasi (IPAL)
PERUMAHAN	Rumah layak huni dan terjangkau
	Penataan bangunan dan lingkungan
	Lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana & utilitas umum (PSU)
AIR BERSIH	Penyediaan air bersih layak
	Penyediaan sarana dan prasarana air bersih di daerah rawan air bersih
DRAINASE	Penurunan luasan genangan di perkotaan
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pengembangan prasarana dan sarana kawasan permukiman serta penanganan permukiman kumuh perkotaan

Capaian kinerja SPM sesuai dengan tupoksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pemerintah dituntut untuk melakukan penilaian terhadap mutu pelayanan. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar urusan pemerintahan dalam melakukan pelayanan public kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif diberbagai daerah maka perangkat daerah wajib:

1. Melakukan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai acuan dalam penyusunan APBD
2. Secara teknis diharapkan agar dapat melaksanakan penghitungan jumlah sasaran penerima layanan serta pembiayaan dengan penuh kehati-hatian, mengingat terdapat sanksi yang akan diberikan kepada kepala daerah yang ttidak mencapai target capaian 100 persen penerapan SPM Saat ini SPM urusan Pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar

Pelaksanaan SPM di Dinas Perumahan Dan Permukiman yang menjadi tanggung jawab sesuai tupiksi di tahun 2024 – 2026 diantaranya

SPM Dinas Perumahan Dan Permukiman

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET				Keterangan
		2024	2025	2026	S/D 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 UR	100 UR	100 UR	300 UR	Satuan unit rumah sesuai satuan di permendagri
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	100 UR	100 UR	100 UR	300 UR	Satuan unit rumah sesuai satuan di permendagri

BIDANG : SPM PERUMAHAN RAKYAT

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

HUBUNGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN SECARA TERINCI BERDASARKAN KELOMPOK SASARAN:

Misi I : Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan perumahan yang berkualitas program yang sudah dilaksanakan adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bekerja sama dengan Dirjen Penyediaan Perumahan yang disalurkan melalui SNVT Perumahan Provinsi Jawa Timur, yaitu : Peningkatan kualitas Rumah tidak Layak huni dengan memperbaiki komponen struktur bangunan dan peningkatan kualitas bahan atap, lantai, dan dinding

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat Berpenghasilan rendah (untuk Perumahan Swadaya)
- Masyarakat korban bencana (untuk RTLH dampak bencana)
- Masyarakat terdampak program pemerintah (untuk RTLH di kawasan kumuh / berada di daerah rawan bencana)

Misi II : Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman.

Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan anggaran APBN di tunjang dengan APBD Kabupaten.

Kelompok Sasaran Layanan :

- Masyarakat berdomisili di kawasan kumuh (meningkatkan kualitas prasarana dan Sarana Umum bagi masyarakat di kawasan kumuh)

Misi III : Membentuk keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan, adalah :

1. Program pembangunan jalan dan jembatan non status

- a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- b. Pembangunan Jalan non status
- c. Peningkatan Jalan non status
- d. Pembangunan Jembatan

Kelompok Sasaran Layanan :

Sarana dan prasarana infrastruktur kawasan (Infrastruktur Non Status)

2. Program Pembangunan Drainase

- a. Pembangunan drainase/gorong-gorong
- b. Peningkatan Drainase dan Gorong-gorong
- c. O & P Drainase

Kelompok Sasaran Layanan :

Infrastruktur Drainase Perkotaan (untuk mengurangi genangan kota)

Misi IV : Terasilitasinya keperluan masyarakat atas aspek air bersih di daerah rawan air bersih.

Terlaksana dengan kolaborasi antara pembiayaan pusat daerah dan desa (Pamsismas) dan pembangunan sarpas dengan dana DAK dan APBD anggaran

Kelompok Sasaran Layanan :
Masyarakat di daerah rawan air bersih

Dari Hubungan Program dan Kegiatan Diatas dapat dikelompokkan sasaran layanan Dinas Perumahan Dan Permukiman Diantaranya :

Kelompok sasaran layanan

NO	KEGIATAN	MITRA / PEMANGKU KEPENTINGAN	KELOMPOK SASARAN LAYANAN
	Meningkatkan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Dirjen Penyediaan Perumahan	Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
		Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur	
	Pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh	Kementrian PUPR , Pemda Kab. Jombang	Infrastruktur dan kelompok masyarakat di kawasan kumuh
	Pembangunan / rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase	Dinas Perkim Kab Jombang	Infrastruktur drainase di daerah rawan genangan kota
	Penyediaan Air Bersih di daerah rawan air bersih	Dinas Perkim Kab Jombang	Masyarakat di daerah rawan air bersih

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman tentu bersinggungan dengan kinerja PD / BUMN lain yang mempunyai kinerja yang sama, salah satunya dalam pemenuhan air bersih, Hal ini bukan menjadi pesaing dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi saling mendukung pencapaian kinerja.
Secara kinerja dapat di klasifikasikan sebagai berikut

No	OPD	Sasaran Kinerja	Wilayah Kerja	Keterangan
1.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Pemenuhan Akses Air Bersih	Daerah Rawan Air Bersih	Belum Layak Minum
2.	PDAM	Pemenuhan Air Minum Bagi Masyarakat	Daerah Perkotaan	Air Layak Minum

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman.

3.1.1. Permasalahan di Bidang Perumahan

1. Masih tingginya angka pemenuhan kebutuhan rumah (backlog perumahan) di Kabupaten Jombang, baik backlog kepemilikan rumah;
2. Keterbatasan akses masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni, di kabupaten Jombang sampai saat ini masih ada 9.095 unit RTLH yang belum tertangani;
3. Perencanaan untuk penanganan/peningkatan kualitas RTLH pasca bencana perlu adanya kevalidan data agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya;
4. Penganggaran RTLH Bencana tidak bisa disiapkan lebih awal sehingga menunggu anggaran selanjutnya;
5. Penanganan RTLH dikawasan kumuh belum optimal dan terpadu antar PD dan penanganan masih dari APBN;
6. Belum adanya ketersediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang valid, terkini (up to date) dan terintegrasi;
7. Belum optimalnya layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
8. Belum ada bantuan penanganan RTLH dari Mitra (Swasta / BUMD/N)
9. Masih tingginya rumah tagga yang belum mendapatkan akses rumah layak huni;
10. PSU perumahan tidak dipelihara oleh pengembang serta diserahkan ke Pemerintah dalam kondisi kurang baik;
11. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai dengan tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, dimana perumahan yang dikembangkan dalam skala kecil tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti eksklusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya;
12. Banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya. Untuk itu diperlukan

konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang ideal;

13. Perumahan umum sebagian belum terbangun maupun masih dalam proses pembangunan.

3.1.2. Permasalahan di Bidang Prasarana Sarana Utilitas Umum

1. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku;
2. Sumber air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat limbah domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas;
3. Banyaknya rumah tangga terutama di pedesaan yang belum memiliki akses sanitasi layak;
4. Peningkatan debit, penyempitan dan pendangkalan saluran, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen infrastruktur yang lain.

3.1.3. Permasalahan di Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani di akhir tahun 2023 seluas 305.13 Ha;
2. Kondisi kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kabupaten Jombang khususnya permukiman pada daerah tepi sungai serta sekitar pusat aktifitas kegiatan seperti pasar telah muncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal. Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai menampilkan penurunan fungsi akibat berbagai sebab, seperti dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagai dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya;

Permasalahan-permasalahan dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dapat teridentifikasi sebagaimana Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	BIDANG PSUU (AIR BERSIH)		
	1. koordinasi dengan perhutani yang sulit 2.kondisi sumur dangkal yang kurang layak 3.Lembaga pengelola SPAM (air bersih) yang belum ada badan hukum dan AD ART 4.akses air minum yang belum merata	1. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku 2.Sumber air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat limbah domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas	Masih adanya daerah yang belum mendapat akses air minum layak Terutama di daerah rawan air bersih
2	BIDANG PSUU (SANITASI)		
	Keterbatasan anggaran infrastruktur sanitasi dan kegiatan sosialisasi	Banyaknya rumah tangga terutama di pedesaan yang belum memiliki akses sanitasi layak	Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur IPAL Domestik dan Individu dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam penyedian MCK
3	BIDANG PSUU (DRAINASE)		
	Masih adanya genangan perkotaan	Peningkatan debit, penyempitan dan pendangkalan saluran, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen infrastruktur yang lain	Bertambahnya jumlah penduduk, pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan, tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
4	BIDANG PKP (KAWASAN KUMUH)KAWASAN KHUSUS / KAWASAN PERKOTAAN / KAWASAN PERDESAAN		
	Kurang masifnya penangana kumuh dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani di akhit tahun 2023 seluas 305.13 Ha	Perkembangan kawasan perkotaan dan pertambahan penduduk yang tinggi
		kondisi kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kabupaten Jombang khususnya permukiman pada daerah tepi sungai serta sekitar pusat aktifitas kegiatan seperti pasar telah muncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal. Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai menampakkan penurunan fungsi akibat berbagai sebab, seperti dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagi dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya	
5	BIDANG PERUMAHAN (RTLH DAN PERUMAHAN)		
	1. keterbatasan akses masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (nonbankable) - (Banklog kepemilikan)	1. masih tingginya angka pemenuhan kebutuhan rumah (backlog perumahan) di Kabupaten Jombang, baik backlog kepemilikan rumah	Keterbatasan pembiayaan dan tingginya pertumbuhan rumah tangga baru
	2.keterbatasan bantuan pemerintah maupun CSR untuk menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat berpenghasilan rendah (Backlog Hunian)	2. keterbatasan akses masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni, di kabupaten Jombang sampai saat ini masih ada 9.095 unit RTLH yang belum tertangani	
	3. masih banyak masyarakat tinggal di daerah yang rawan bencana atau bahkan tinggal di daerah yang bukan diperuntukkan untuk permukiman	Perencanaan untuk penanganan/peningkatan kualitas RTLH pasca bencana perlu adanya kevalidan data agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya	Belum tersusunnya dokumen road map daerah rawan bencana dan rencana relokasi program pemerintah
		Penganggaran RTLH Bencana tidak bisa disiapkan lebih awal sehingga menunggu anggaran selanjutnya	

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani termasuk RTLH dikawasan kumuh	Penanganan RTLH dikawasan kumuh belum optimal dan terpadu antar PD dan penanganan masih dari APBN	Penanganan RTLH dikawasan kumuh hanya bertumpu pada pembiayaan APBN/DAK
	5. belum adanya sinkronisasi dan integrasi data yang valid dan up to date.	belum adanya ketersediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang valid, terkini (up to date) dan terintegrasi	Belum Updating data RTLH secara berkelanjutan
	Masyarakat MBR belum memahami proses pengajuan bantuan RTLH	belum optimalnya layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman	Belum tersedianya media informasi layanan penanganan RTLH
	Belum adanya koordinasi antara pemerintah dengan Swasta / BUMN terkait penyediaan Rumah Layak Huni	Belum ada bantuan penanganan RTLH dari Mitra (Swasta / BUMD/N)	Belum adanya kemitraan dengan swasta / BUMN terkait CSR untuk RTLH di kabupaten Jombang
	Masih tingginya rumah yang belum layak huni	Masih tingginya rumah tagga yang belum mendapatkan akses rumah layak huni	Pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyaknya pernikahan dini, keterbatasan anggaran untuk penyediaan / rehabilitasi rumah layak huni
	PSU perumahan umum yang tidak terpelihara	PSU perumahan tidak dipelihara oleh pengembang serta diserahkan ke Pemerintah dalam kondisi kurang baik	PSU perumahan umum di kabupaten jombang banyak yang belum diserahkan ke PD
		Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai dengan tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, dimana perumahan yang dikembangkan dalam skala kecil tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti eksklusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya	
		banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya. Untuk itu diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang idea	
	Aset PSU perumahan yang belum diserahkan ke pemerintah daerah	Perumahan umum sebagian belum terbangun maupun masih dalam proses pembangunan	aset PSU perumahan umum yang diserahkan ke pemerintah daerah harus dalam kondisi baik
6	SEKRETARIAT (PERENCANAAN, UMUM, ASET KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN)		
	Perencanaan yang tidak berkelanjutan	Perencanaan Strategis dan Tahunan tidak berkesinambungan (Perubahan kebijakan dan anggaran)	Terjadinya perubahan kebijakan dan anggaran perencanaan
	Penambahan jumlah ASN dan kenaikan gaji mempengaruhi besarnya anggaran	Penambahan jumlah ASN tidak diikuti dengan penambahan alokasi anggaran	Terjadi kekurangan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN
	Keterbatasan anggaran yang tersedia	Rendahnya honorarium Non ASN	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pembayaran honorarium Non ASN
	Terbatasnya jumlah SDM sehingga mempengaruhi kinerja	Pekerjaan diselesaikan dengan jumlah SDM yang terbatas sehingga memerlukan waktu yang lama	Penyelesaian penyusunan Laporan Akhir Tahun melebihi batas waktu yang telah ditetapkan
	Kenaikan pagu anggaran mempengaruhi besarnya penerimaan honor pengelola keuangan	Tidak terjadi kenaikan anggaran untuk honor pengelola keuangan	Terjadi kekurangan anggaran untuk honor pengelola keuangan
	Rasio ASN di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Jombang yang mengikuti Diklat masih rendah	Terbatasnya jumlah ASN dan rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya	Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya
	Rendahnya Peralatan dan Perlengkapan kantor yang layak pakai	Terbatasnya jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang layak pakai	Terbatasnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru peralatan dan perlengkapan kantor
	Kenaikan harga tetapi tidak diikuti dengan kenaikan anggaran	Jumlah barang cetakan terbatas	Masih kurangnya alokasi anggaran untuk belanja cetak dan penggandaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Terbatasnya persediaan peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	Rendahnya jumlah persediaan peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor	Terbatasnya alokasi biaya untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor
	Kenaikan tarif BBM tidak diikuti dengan kenaikan anggaran	Jumlah pemberian BBM berkurang sehingga operasional kendaraan Dinas/ Lapangan jadi terganggu	Terbatasnya jumlah alokasi BBM sehingga operasional kendaraan Dinas/ Lapangan jadi terganggu
	Semakin bertambahnya rapat koordinasi dan konsultasi setiap tahunnya	Bertambahnya rapat koordinasi dan konsultasi tetapi tidak diikuti bertambahnya fasilitas pendukung	Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi setiap tahunnya semakin bertambah banyak dan kurangnya fasilitas pendukung untuk pelaksanaannya
	Terbatasnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbatasnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	Terbatasnya alokasi biaya untuk bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahunnya
	Terbatasnya peralatan rumah tangga	Rendahnya jumlah persediaan peralatan rumah tangga	Terbatasnya alokasi biaya untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru peralatan rumah tangga
	Kenaikan jumlah tagihan pembayaran listrik dan telepon	Tingginya jumlah tagihan pembayaran listrik dan telepon setiap bulannya	Terbatasnya alokasi biaya untuk pembayaran tagihan listrik dan telepon setiap bulannya
	Semua pegawai harus dibayarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan setiap bulannya	kenaikan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus dibayarkan setiap bulannya	Terbatasnya alokasi biaya untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan setiap tahunnya
	Rendahnya rasio kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	Terbatasnya jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai	Terbatasnya alokasi biaya untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru kendaraan Dinas/ Operasional setiap tahunnya
	Rendahnya rasio pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya masih rendah setiap tahunnya	Terbatasnya alokasi biaya untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya setiap tahunnya
	Rendahnya rasio sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang layak pakai	Terbatasnya jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang layak pakai	Terbatasnya alokasi biaya untuk pemeliharaan maupun pengadaan baru sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya setiap tahunnya

Strategi dalam mewujudkan kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara terintegrasi;
- 2) Meningkatkan kualitas permukiman dengan meningkatkan pembangunan/pemeliharaan sarana prasarana kawasan permukiman;
- 3) Meningkatkan pelayanan dasar di kawasan permukiman (Air Bersih dan Sanitasi) dengan membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana air bersih, serta sanitasi;
- 4) Meningkatkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Penanganan dan pencegahan kawasan kumuh.

Dari hasil penelaahan yang telah dilakukan, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang telah memperoleh pedoman dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Jombang antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas air minum perdesaan serta sanitasi permukiman;
- b. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak;
- c. Peningkatan dan perluasan prasarana permukiman;
- d. Peningkatan kualitas penataan pengembangan dan pengelolaan perumahan;
- e. Penanganan kawasan kumuh.

3.2 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
I	URUSAN PEKERJAAN UMUM		
A	AIR BERSIH (AIR MINUM)		
1	Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku	1	Masih adanya daerah rawan akses air bersih terutama di musim kemarau (ABT/Air permukaan)
2	Sumber air permukaan mengalami pencemaran yang semakin meningkat akibat limbah domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa dijamin, baik kuantitas dan kualitas		
B	SANITASI		
1	Banyaknya rumah tangga terutama di pedesaan yang belum memiliki akses sanitasi layak	1	Masih tingginya jumlah Rumah Tangga yang belum mempunyai akses sanitasi layak
C	DRAINASE		
1	Peningkatan debit, penyempitan dan pendangkalan saluran, lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan komponen infrastruktur yang lain	1	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase belum berjalan optimal
II	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
A	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani di akhir tahun 2023 seluas 305.13 Ha	1	Munculnya kawasan kumuh baru terutama di kawasan perkotaan
2	kondisi kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota. Hal ini terkait dengan penurunan daya dukung lingkungan serta perilaku masyarakat yang memberikan dampak terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Di beberapa bagian Kabupaten Jombang khususnya permukiman pada daerah tepi sungai serta sekitar pusat aktifitas kegiatan seperti pasar telah muncul kawasan-kawasan kumuh dengan sanitasi yang jauh dari ideal. Disisi lain beberapa kawasan di bagian tengah kota juga mulai		

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
	menampakkan penurunan fungsi akibat berbagai sebab, seperti dukungan utilitas yang buruk, degradasi lingkungan, citra kawasan sebagai dampak persoalan sosial yang muncul, dan lain sebagainya		
B	PERUMAHAN (PENANGANAN RTLH PENCEGAHAN KUMUH BARU / KORBAN BENCANA / RELOKASI PROGRAM KAB)		
1	masih tingginya angka pemenuhan kebutuhan rumah (backlog perumahan) di Kabupaten Jombang, baik backlog kepemilikan rumah	1	Masih banyak Rumah tangga yang belum mendapatkan akses Rumah layak huni
2	keterbatasan akses masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah terhadap rumah layak huni, di kabupaten Jombang masih ada 9.095 unit RTLH yang belum tertangani, dan Rumah tangga yang menempati Rumah tidak layak huni rentan terhadap kesehatan, dan beban ekonominya		
3	belum optimalnya layanan informasi perumahan dan kawasan permukiman		
4	Perencanaan untuk penanganan/peningkatan kualitas RTLH pasca bencana perlu adanya kevalidan data agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kewenangannya	2	Belum Optimalnya penanganan perumahan/RTLH pasca bencana
	Penganggaran RTLH Bencana tidak bisa disiapkan lebih awal sehingga menunggu anggaran selanjutnya		
5	Penanganan RTLH dikawasan kumuh belum optimal dan terpadu antar PD dan penanganan masih dari APBN	3	Banyaknya RTLH di kawasan perkotaan terutama dikawasan kumuh
6	belum adanya ketersediaan basis data perumahan dan kawasan permukiman yang valid, terkini (up to date) dan terintegrasi	4	Penerima bantuan tidak sesuai dengan data base RTLH PD
7	Belum ada bantuan penanganan RTLH dari Mitra (Swasta / BUMD/N)	5	belum ada penyediaan hunian layak huni melalui kemitraan
C	PSU PERUMAHAN		
1	PSU perumahan tidak dipelihara oleh pengembang serta diserahkan ke Pemerintah dalam kondisi kurang baik	1	Menurunnya kualitas PSU perumahan umum di kabupaten jombang
2	Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai dengan tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, dimana perumahan yang dikembangkan dalam skala kecil tanpa mempertimbangkan keterhubungannya dengan kawasan permukiman sekitarnya sehingga menimbulkan berbagai persoalan seperti eksklusivitas, hambatan aksesibilitas kawasan serta gesekan sosial antar kawasan perumahan dengan permukiman yang berada di sekitarnya		
3	banyaknya perumahan dan kawasan perumahan yang belum tertata Prasarana dan Sarana Utilitasnya. Untuk itu diperlukan konsep perencanaan kawasan lingkungan yang sistematis dengan konsep kawasan yang jelas dengan memperhatikan kawasan secara keseluruhan sehingga terbentuk struktur kota yang idea		
D	SEKRETARIAT		
1	Perencanaan Strategis dan Tahunan tidak berkesinambungan (Perubahan kebijakan dan		Perencanaan tidak selaras antara jangka pendek (renja) dan Jangka

NO	DESKRIPSI PERMASALAHAN BERDASAR URUSAN	NO	ISU STRATEGIS
1	2	3	4
	anggaran)		menengah (Renstra)
2	Terbatasnya jumlah kendaraan Dinas/ Operasional yang layak pakai		Masih Kurangnya kendaraan dinas/ operasional
3	Terbatasnya jumlah ASN dan rendahnya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya		Masih kurangnya kompetensi dan Profesionalisme SDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman.

Agar terciptanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi Dinas Perumahan dan Permukiman, dirumuskanlah tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan dan Permukiman serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 3 tahun. Adanya tujuan ini memfokuskan kinerja dari Dinas Perumahan dan Permukiman, dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.

Adapun tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang adalah:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator tujuan; Indeks infrastruktur permukiman

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan , dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. adapun sasaran untuk mencapai tujuan Dinas Perumahan dan Permukiman **dengan ukuran keberhasilan** peningkatannya indikator- indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja diantaranya;

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman,
Dengan indikator;

- a. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
- b. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
- c. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
- d. Persentase penanganan kawasan kumuh
- e. Persentase rumah layak huni

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut (Tabel 4.1):

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke		
				1	2	3
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman		Indeks Infrastruktur Permukiman	0,7688	0,8043	0,8534
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	86,48%	86,78%	87,08%
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	89,57%	89,67%	89,77%
			Persentase Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	54,25%	58,04%	66,46%
			Persentase Penanganan Kawasan Kumuh	55,77%	69,24%	84,85%
			Persentase Rumah Layak Huni	98,31%	98,43%	98,55%

Secara deskripsi, Tema dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang bisa dipaparkan sebagai berikut:

Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis

Tema tersebut dijabarkan dengan

Tujuan 4 :

Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya

Dengan indicator :

Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman

Sasaran 11 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Dengan indikator

Indeks Infrastruktur Permukiman

Sedangkan pada Dinas Perumahan dan Permukiman

Dijabarkan dengan tujuan:

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman;

Tujuan tersebut memiliki sasaran:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman

Dengan indikator sasaran;

1. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak
2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
3. Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik
4. persentase kawasan kumuh
5. Persentase rumah layak huni

Di implementasikan dalam program ;

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
4. Program Kawasan Permukiman;
5. Program Pengembangan Permukiman;
6. Program Pengembangan Perumahan;
7. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1 B. Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) Dinas Perumahan dan Permukiman.

Agar terciptanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman, merumuskanlah tujuan, sasaran juga mengacu pada norma, standar , prosedur, kaidah yang sesuai dengan urusan, tugas pokok dan kebijakan yang telah ditetapkan adapun target NSPK Renstra 2024-2026 Dinas Perumahan Dan Permukiman adalah sebagai berikut :

No.	Target NSPK (Norma, Standar, Prosedur,Kaidah)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (%)		
		2019	2020	2023
1	Rumah Tangga yang terlayani akses sanitasi layak	86,48%	86,78%	87,08%
2	Rumah Tangga yang terlayani akses air minum layak	89,57%	89,67%	89,77%
3	Berkurangnya genangan perkotaan	54,25%	58,04%	66,46%
4	Berkurangnya kawasan kumuh	55,77%	69,24%	84,85%
5	Rumah Tangga yang terlayani akses rumah layak huni	98,31%	98,43%	98,55%

4.2 CASCADING DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

SASARAN OPD 1 INDIKATOR 1

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

KAB			
	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman	
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman	
	FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak ,Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni	
OPD	SASARAN OPD 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	
	INDIKATOR 1	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	
	FORMULA	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak / Jumlah rumah tangga +(n+1)x 100%	

		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan
KEPALA DINAS	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	Jumlah Sanitasi rumah tangga yang tertangani / sanitasi yang direncanakan x 100 %	%
ESELON III	KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten / kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga yang tertangani akses sanitasi	Jumlah RT yang mendapat akses sanitasi x 1 RT	Rumah Tangga
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah data SPAL / IPLT yang tersusun x 1 Dokumen	Dokumen

		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga pengelolaan air limbah setempat yang tersedia x 1 Rumah Tangga	Rumah Tangga
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Instalasi air limbah yang terpelihara x 1 unit	Unit
		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	Jumlah IPLT yang terbangun x 1 M ³ / Hari	M ³ /Hari

SASARAN OPD 1**INDIKATOR 2**

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)						
KAB	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya				
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman				
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman				
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman				
	FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak ,Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni				
OPD	SASARAN OPD 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman				
	INDIKATOR 2	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak				
	FORMULA	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak / Jumlah rumah tangga +(n+1) x 100%				
		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan

KEPALA DINAS	PROGRAM	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	Jumlah Sarpras Air Bersih rumah tangga yang tertangani / Sarpras air bersih yang direncanakan x 100 %	%
ESELON III	KEGIATAN	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten / kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih	Jumlah RT yang mendapat akses air bersih x 1 RT	Rumah Tangga
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun x 1 Dok	Dokumen

		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Jumlah Kapasitas penyediaan air minum yang terlayani / terbangun x 1 Ltr/Dtk	Liter/Detik
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah SPAM Yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan x 1 unit	Unit
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani x 1 SR	SR

				Jaringan Perpipaan		
--	--	--	--	--------------------	--	--

SASARAN OPD 1 INDIKATOR 3

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)						
KAB	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya				
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman				
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman				
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman				
	FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak ,Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni				
OPD	SASARAN OPD 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman				
	INDIKATOR 3	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik				
	FORMULA	Panjang saluran drainase dalam kondisi baik / Panjang saluran drainase x 100%				
		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan

KEPALA DINAS	PROGRAM	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	Panjang Drainase yang tertangani / drainase yang terbangun / terehabilitasi x 100 %	%
ESELON III	KEGIATAN	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah kabupaten / kota	Meningkatnya panjang drainase yang tertangani	Panjang drainase yang terbangun/terehabilitasi / terpelihara	Panjang drainase yang Terbangun /terehabilitasi/ terpelihara x 1 m	M
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen rencana kebijakan, strategi dan teknis sistim drainase perkotaan yang tersusun x 1 dok	Dokumen

		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang drainase / trotoar yang terbangun x 1 SDP	Sistem Drainase Perkotaan
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Panjang drainase / trotoar yang terehabilitasi x 1 SDP	Sistem Drainase Perkotaan
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Panjang Sistem Drainase lingkungan yang terpelihara x 1 M	M

		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun x 1 Dok	Dokumen
--	--	---	--	--	--	---------

SASARAN OPD 1 INDIKATOR 4

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)						
KAB						
	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya				
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman				
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman				
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman				
	FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak ,Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni				
OPD	SASARAN OPD 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman				
	INDIKATOR 4	Pesentase Penanganan kawasan kumuh				
	FORMULA	Luas kawasan kumuh tertangani/ luas kawasan kumuh +(n+1) x 100 %				
		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan

KEPALA DINAS	PROGRAM	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	Luas dok Kawasan kumuh yang tersusun / dok kawasan kumuh yang direncanakan x 100 %	%
ESELON III	KEGIATAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan kumuh	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman kumuh yang ditindaklanjuti	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman kumuh yang ditindaklanjuti x 1Dok	Dok

ESELON IV	SUB KEGIATAN	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen kesepakatan rencana pembangunan permukiman terintegrasi yang tersusun x 1 dok	Dokumen
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan kegiatan yang dikoordinasikan x 1 Lap	Laporan

		Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga kawasan kumuh yang mendapatkan intervensi pembangunan	Jumlah RT yang mendapat akses rumah layak huni x 1 RT	RT/KK
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rumah swadaya yang ditingkatkan strukturnya x 1 unit rumah	Unit Rumah
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah layak huni yang dibangun untuk peningkatan kualitas x 1 unit	Unit

		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Luas permukiman kumuh yang dipugar x 1 Ha	Ha
--	--	--	---	--	---	----

SASARAN OPD 1 INDIKATOR 5

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)						
KAB						
	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya				
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman				
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman				
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman				
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman				
	FORMULA	Indeks Pemenuhan Air Minum Layak, Indeks Pemenuhan Sanitasi(Drainase & Sanitasi) Layak ,Indeks Penanganan Kawasan Kumuh, Indeks Rumah Layak Huni				
OPD	SASARAN OPD 1	Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman				
	INDIKATOR 5	Persentase rumah layak huni				
	FORMULA	Jumlah rumah layak huni / Jumlah rumah +(n+1) x 100%				
		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan

KEPALA DINAS	PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	Rumah Tidak Layak Huni korban bencana tertangani / Rumah layak huni yang direncanakan x 100 %	;%
ESELON III	KEGIATAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Tersusunnya dokumen data rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang berada daerah rawan bencana dan relokasi	Jumlah dokumen data rumah di daerah rawan bencana dan relokasi yang tersusun	Jumlah dokumen data rumah di daerah rawan bencana dan relokasi yang tersusun x 1 Dok	Dok
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana yang tersusun x 1 Dok	Dok

		Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana yang Terverifikasi x 1 Dok	Dok
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangun , terehabilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang terehabilitasi	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang terehabilitasi x 1 Unit Rumah	Unit Rumah
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terehabilitasi x 1 Unit Rumah	Unit Rumah

		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Terbangun x 1 Unit Rumah	Unit Rumah
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Persentase RTLH yang telah dibangun	Rumah Tidak Layak Huni tertangani / Rumah layak huni yang direncanakan x 100 %	%
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses rumah layak huni	Jumlah Dokumen perencanaan x 1 Dok	RT

		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Rumah yang mendapat akses rumah layak huni/ diperbaiki x 1 unit rumah	Unit Rumah
--	--	---	--	---	--	------------

		Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen serah terima rumah layak huni yang tersusun x 1 Dok	Dokumen
--	--	---	---	--	--	---------

		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian yang tersusun x 1 laporan	Laporan
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	Jumlah PSU perumahan tertangani/ jumlah PSU Perumahan x 100 %	%
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya PSU perumahan dalam kondisi baik	Panjang PSU perumahan yang terehabilitasi / terpelihara	Panjang PSU yang terehabilitasi x 1 m	m

		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen perencanaan x 1 Dok	Dokumen
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan sarpras PSU yang tertangani x 1 Lokasi	Lokasi

		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan singronisasi yang tersusun x 1 Laporan	Laporan
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang yang tersusun x 1 laporan	Laporan

SASARAN OPD 2 INDIKATOR 1

CASCADING DINAS PERKIM (PERMENDAGRI; 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)			
KAB			
	TUJUAN KAB 4	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	
	INDIKATOR KAB 5	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	
	SASARAN KAB 7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman	
	INDIKATOR SASARAN KAB 8	Indeks Infrastruktur Permukiman	
OPD	TUJUAN OPD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	
	INDIKATOR TUJUAN OPD	Indeks Reformasi Birokrasi	
	FORMULA	Nilai Reformasi Birokrasi PD	
OPD	SASARAN OPD 2	Meningkatnya Kualitas Akuntabiilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
	INDIKATOR 1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	
	FORMULA	Penilaian Tim Sakip	

		Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator	Formula	Satuan
KEPALA DINAS	PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun / dokumen yang direncanakan x 100%	%
ESELON III	KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah dokumen yang tersusun x 1 dok / Dokumen yang direncanakan x 100%	%
ESELON IV	SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun x 1 dok	Dokumen

		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA SKPD yang tersusun x 1 dok	Dokume n
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang tersusun x 1 Laporan	Laporan

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tepat waktu	Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN / Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN x 100%	%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN x 1 Orang	Orang/bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan x 1 dok	Dokumen

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan keuangan yang tersusun x 1 Laporan	Laporan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaporan administrasi barang milik daerah yang tersusun sesuai aturan	Jumlah pelaporan administrasi yang terlaksana/ pelaporan administrasi yang terencana x 100%	%
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan BMD yang tersusun x 1 Laporan	Laporan

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	Persentase pegawai yang terlatih	Jumlah pegawai yang terlatih x 100 %	%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan x 1 orang	Orang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi yang terlaksana / jumlah pelayanan administrasi terencana x 100%	%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia x 1 Paket	Paket

		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia x 1 Paket	Paket
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang tersedia x 1 Paket	Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia x 1 paket	Paket
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD x 1 Laporan	Laporan

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundangan yang tersedian x 1 Dok	Dokumen
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Peratan rumah tangga yang tersedia x 1 paket	Paket
		Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana x 100 %	%
		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarpras gedung Kantor yang tersedia x 1 Unit	Unit

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Peresentase pemenuhan penunjang urusan PD	Jumlah Pemenuhan Penunjang PD x 100 %	%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia x 1 Laporan	Laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tersedia x 1 Laporan	Laporan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Jumlah aset yang terpelihara / jumlah aset x 100%	%

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya x 1 unit	Unit
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas Pejabat yang terpelihara dan terbayar pajaknya x 1 unit	Unit
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah gedung yang terpelihara x 1 Unit	Unit

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Jumlah Sarpras gedung kantor yang terpelihara x 1 unit	Unit
--	--	---	--	---	--	------

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perumahan dan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan program sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan Dinas, dengan mengacu pada RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026. Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan (tiga tahun). Adanya tujuan membuat fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan satu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dinas secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran berupa rencana-rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan dan kebijakan.

Kebijakan adalah keputusan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan dan Program Dinas Perumahan dan Permukiman sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Jombang yang dirumuskan melalui analisis dan dijabarkan sebagai berikut.

Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman

1. Percepatan penanganan sanitasi permukiman
2. Percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat pedesaan;
3. Percepatan penanganan drainase permukiman;
4. Percepatan penanganan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman;
5. Percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Rumusan strategis dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam tiga tahun mendatang relevansinya dapat dijabarkan dalam Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tema Mewujudkan Jombang Unggul dan Berbudaya Berbasis Agribisnis

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggulan lainnya	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman	Percepatan penanganan sanitasi permukiman (tuntas desa / kecamatan)	Meningkatnya kualitas air minum perdesaan serta sanitasi permukiman
		Percepatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat pedesaan / percepatan daerah khusus / rawan air	
		Percepatan penanganan drainase permukiman (luas genangan di perkotaan)	
		Percepatan penanganan sarana dan prasarana kawasan perumahan dan permukiman	
		Percepatan penanganan rehabilitasi rumah tidak layak huni (tuntas desa / kecamatan)	Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Dinas Perumahan dan Permukiman

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan, program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman yang direncanakan untuk Periode Tahun 2024-2026 meliputi: program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program, kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dilaksanakan pada Renstra Tahun 2024-2026 dapat dirincikan sebagai berikut (Tabel 6.1):

Tabel 6.1. Nama Program Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026

NO	Nama Program dalam Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Kawasan Permukiman
5	Program Pengembangan Permukiman
6	Program Pengembangan Perumahan
7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
8	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL 6.2 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KAB. JOMBANG
Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 050-5889

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 050-5889																			
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Tujuan , Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capa ian Pada Tahu n Awal (2023)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
										2024			2025		2026				
										K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp,
5	6	7	8	9	10		11		12	13	8		14		15		18	20	
Meningka tnya kualitas Kawasan Permuki man	Indeks infrastru ktur lingkung an permuki man								57,03 2	76,88		133.149.80 2.193	80,43 8.864	85,34 2.253	95.064.91	85,34	241.493.76 3.310		

		Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak						89,47 %	89,57 %		2.650.000.000	89,67 %	2.650.000.000	89,77 %	1.850.000.000	89,77%	7.150.000.000	
				1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	%	0%	0,95 %		2.650.000.000	0,95 %	2.650.000.000	0,96 %	1.850.000.000	2,86%	7.150.000.000	
				1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih	RT/KK	0 RT/KK	400 RT		2.650.000.000	400 RT	2.650.000.000	400 RT	1.850.000.000	1.200 RT/KK	7.150.000.000	

				1.03.03.2.0 1.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	15 Dok	10 Dok		250.000.00	10 Dok	250.000.00	10 Dok	250.000.00	30 Dok	750.000.00	
				1.03.03 2.01.04	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	0 SR	400 SR		800.000.00	400 SR	800.000.00	400 SR	800.000.00	1.200 SR	2.400.000.000	
				1.03.03.2.0 1.08	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya sarana prasarana air bersih	Jumlah Sarana dan Prasarana Air Bersih yang terpelihara	Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
				1.03.03.2.0 1.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Terpeliharanya SPAM Berbasis Masyarakat	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	0 Unit	2 Unit		800.000.00	2 Unit	800.000.00	1 Unit	400.000.00	5 Unit	2.000.000.000	
				1.03.03.2.0 1.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Meningkatnya luasan cakupan pelayanan SPAM air bersih	luas cakupan pelayanan jaringan SPAM Air Bersih	Ha	0.00 Ha	1.041 Ha		800.000.00	1.924 Ha	800.000.00	158 Ha	400.000.00	3.123 Ha	2.000.000.000	

			Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak						86,18 %	86,48 %		8.400.000.000	86,78 %	8.500.000.000	87,08 %	8.600.000.000	87,08%	25.500.000.000	
				1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	%	0,00 %	2,16 %		8.400.000.000	2,21 %	8.500.000.000	2,26 %	8.600.000.000	6,63%	25.500.000.000	
				1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga yang tertangani akses sanitasi	RT/KK	0 RT/KK	1.200 RT		8.400.000.000	1.200 RT	8.500.000.000	1.200 RT	8.600.000.000	3.600 RT/KK	25.500.000.000	
				1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0 Dok	4 Dok		350.000.000	4 Dok	350.000.000	4 Dok	350.000.000	12 Dok	1.050.000.000	

				1.03.05.2.0 1.06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Tebangunnya Tangki Septik untuk Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	0 RT	1.200 RT		7.200.000. 000	1.200 RT	7.200.000. 000	1.200 RT	7.200.000. 000	3.600 RT	21.600.000. .000	
				1.03.05.2.0 1.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	0 Unit	8 Unit		400.000.00 0	9 Unit	500.000.0 00	10 Unit	600.000.0 00	27 Unit	1.500.000. 000	
				1.03.05.2.0 1.15	Pembangunan/Pe nyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Terbangun/Terse dianya IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	M³/Hari	0 M³	30 M³		450.000.00 0	30 M³	450.000.0 00	30 M³	450.000.0 00	90 M³	1.350.000. 000	
			Persent ase jaringan drainase dalam kondisi baik						47,18 %	54,25 %		31.426.949 .250	58,04 %	18.561.39 4.500	66,46 %	51.113.46 5.200	66,46%	49.704.808 .950	
				1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Tertehabillitasi	%	10,29 %	14,98 %		31.426.949 .250	6,98 %	18.561.39 4.500	14,52 %	51.113.46 5.200	36,48%	49.704.808 .950	

				1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya panjang drainase yang tertangani	Panjang drainase perkotaan yang terbangun/ ter rehabilitasi / terpelihara	m	2.500 m	6.128 m		31.426.949 .250	2.932 m	18.561.39 4.500	6.437 m	51.113.46 5.200	15.496 m	49.704.808 .950	
				1.03.06.2.0 1.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	1 Dok	1 Dok		150.000.00 0	1 Dok	150.000.0 00	1 Dok	150.000.0 00	3 Dok	450.000.00 0	
				1.03.06.2.0 1.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	2.500 m	1.490 m		6.629.010. 000	258 m	964.662.0 00	2.229 m	9.916.821. 000	3.977 m	17.510.493 .000	

				1.03.06.2.0 1.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	0 m	4.638 m		24.547.939 .250	2.674 m	17.346.73 2.500	4.208 m	40.946.64 4.200	11.519 m	31.444.315 .950	
				1.03.06.2.0 1.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	M	0 m	0 m	0	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	
				1.03.06.2.0 1.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	Dokumen	0 Dok	1 Dok		100.000.00 0,00	1 Dok	100.000.0 00	1 Dok	100.000.0 00	3 Dok	300.000.00 0,00	
			Pesentase Penanganan kawasan kumuh						35,72 %	55,77 %		65.275.000 .000	69,24 %	9.525.000. 000	84,85 %	8.025.000. 000	84,85%	82.825.000 .000	
				1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan	%	0%	100%		29.475.000 .000	100%	7.925.000. 000	100%	7.925.000. 000	100,00 %	45.325.000 .000	

							RKP												
				1.04.03.2.0 1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan kumuh	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman kumuh yang ditindaklanjuti	Dokumen	0 dok	1 dok		3.300.000.000	1 dok	1.300.000.000	1 dok	1.300.000.000	3 dok	5.900.000.000	
				1.04.03.2.0 1.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen	0 Dok	9 Dok		3.000.000.000	4 Dok	1.000.000.000	4 Dok	1.000.000.000	17 Dok	5.000.000.000	

				1.04.03.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	0 laporan	3 Lap		300.000.00 0	3 Lap	300.000.0 00	3 Lap	300.000.0 00	9 laporan	900.000.00 0	
				1.04.03.2.0 3	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga kawasan kumuh yang mendapatkan intervensi pembangunan	RT/KK	0 RT/KK	124 RT		26.175.000 .000	124 RT	6.625.000. 000	124 RT	6.625.000. 000	372 RT/KK	39.425.000 .000	
				1.04.03.2.0 3.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	0 Unit Rumah	0 UM		0	0 UM	0	0 UM	0	0 Unit Rumah	0	

				1.04.03.2.0 3.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Di pugar	Ha	0 Ha	23,94 Ha		26.175.000 .000	23,94 Ha	6.625.000. 000	23,94 Ha	6.625.000. 000	72 Ha	39.425.000 .000	
				1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0%	31,19 %		35.800.000 .000	30,46 %	1.600.000. 000	50,74 %	100.000.0 00	50,74%	37.500.000 .000	

				1.03.07.2.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di kawasan strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur permukiman	Panjang infrastruktur permukiman yang terbangun/terehabilitasi / terpelihara	m	0 m	12.10 1 m		35.800.000 .000	427 m	1.600.000. 000	0 m	100.000.0 00	12.528 m	37.500.000 .000	
				1.03.07.2.0 1.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di dikawasan strategis Daerah Kab/Kota	Tersedianya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Jaringan	0 SJ	14 SJ	0	35.700.000 .000	1 SJ	1.500.000. 000	0 SJ	0	15 SJ	37.200.000 .000	
				1.03.07.2.0 1.04	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan strategis di Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggara n Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Orang	0 Oran g	50 Oran g		100.000.00 0	50 Oran g	100.000.0 00	50 Oran g	100.000.0 00	150 Orang	300.000.00 0	

			Persentase rumah layak huni						98,18 %	98,31 %		19.000.000.000	98,43 %	19.000.000.000	98,55 %	19.000.000.000	98,55%	57.000.000.000	
				1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	;%	0,00 %	100,00 %		6.000.000.000	100,00 %	6.000.000.000	100,00 %	6.000.000.000		18.000.000.000	
				1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Tersusunnya dokumen data rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang berada daerah rawan bencana dan relokasi	Jumlah dokumen data rumah di daerah rawan bencana dan relokasi yang tersusun	Dok	0 Dok	1 Dok		500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000		1.500.000.000	
				1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dok	0 Dok	1 Dok		500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	

				1.04.02.2.0 1.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dok	0 Dok	0 Dok	0	0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	
				1.04.02.2.0 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangun , terehabilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang terehabilitasi	Unit Rumah	0 Unit Rumah	200 UR		5.500.000.000	200 UR	5.500.000.000	200 UR	5.500.000.000	60000,00%	16.500.000.000	
				1.04.02.2.0 3.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0 unit rumah	100 UR		2.000.000.000	100 UR	2.000.000.000	100 UR	2.000.000.000	300 UR	6.000.000.000	

				1.04.02.2.0 3.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0 unit ruma h	100 UR		3.500.000. 000	100 UR	3.500.000. 000	100 UR	3.500.000. 000	300 UR	10.500.000 .000	
				1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Persentase RTLH yang telah di bangun	%	0,00 %	6,84 %		11.500.000 .000	7,34 %	11.500.00 0.000	7,93 %	11.500.00 0.000	22,11%	34.500.000 .000	
				1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses rumah layak huni		0 RT/K K	500 RT		11.500.000 .000	500 RT	11.500.00 0.000	500 RT	11.500.00 0.000	1.500 RT/KK	34.500.000 .000	

				1.04.04.2.0 1.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	2.462 UR	500 UR		10.000.000.000	500 UR	10.000.000.000	500 UR	10.000.000.000	1.500 UR	30.000.000.000	
				1.04.04.2.0 1.02	Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	3 Dok	3 Dok		1.500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	9 Dok	4.500.000.000	

				1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	%	0%	7,62 %		1.500.000.000	8,25 %	1.500.000.000	8,99 %	1.500.000.000	24,86%	4.500.000.000	
				1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya PSU perumahan dalam kondisi baik	Panjang PSU perumahan yang terhabilitasi / terpelihara	m	2.942 m	700 m		1.500.000.000	700 m	1.500.000.000	700 m	1.500.000.000	2.100 m	4.500.000.000	
				1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	16 Dok	8 Dok		400.000.000	8 Dok	400.000.000	8 Dok	400.000.000	24 Dok	1.200.000.000	

				1.04.05.2.0 1.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	8 Lokasi	8 Lokasi		800.000.00	8 Lokasi	800.000.00	8 Lokasi	800.000.00	24 Lokasi	2.400.000.000	
				1.04.05.2.0 1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	16 laporan	8 Lap		150.000.00	8 Lap	150.000.00	8 Lap	150.000.00	24 laporan	450.000.00	
				1.04.05.2.0 1.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Dokumen	40 dok	15 dok		150.000.00	15 dok	150.000.00	15 dok	150.000.00	45 laporan	450.000.00	

									76	69			72		75		75		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi								47,72	73		6.397.852.943	73	6.439.654.364	73	6.476.447.053	73,00	19.313.954.360	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah						80,87	80,87		6.397.852.943	80,87	6.439.654.364	80,87	6.476.447.053	80,22	19.313.954.360	
				1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	0%	100%		6.397.852.943	100%	6.439.654.364	100%	6.476.447.053	100,00 %	19.313.954.360	
				1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	0%	100%		30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	

				1.04.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0 Dok	4 Dok		15.000.000	4 Dok	15.000.00 0	4 Dok	15.000.00 0	12 Dok	45.000.000	
				1.04.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen	0 Dok	0 Dok		0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	
				1.04.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	0 laporan	5 Lap		15.000.000	5 Lap	15.000.00 0	5 Lap	15.000.00 0	15 Lap	45.000.000	

						Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD												
				1.04.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tepat waktu	%	0%	100%		4.994.000. 444	100%	4.994.070. 444	100%	4.994.105. 444	100%	14.982.176 .332	
				1.04.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	0 OB	35 OB		4.600.050. 444	35 OB	4.600.050. 444	35 OB	4.600.050. 444	35 OB	13.800.151 .332	
				1.04.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan	Dokume n	0 Dok	12 Dok		388.800.00 0	12 Dok	388.800.0 00	12 Dok	388.800.0 00	12 Dok	1.166.400. 000	

							SKPD												
				1.04.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0 laporan	1 Lap		5.150.000	1 Lap	5.220.000	1 Lap	5.255.000	3 laporan	15.625.000	
				1.04.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaporan administrasi barang milik daerah yang tersusun sesuai aturan	%	100%	100%		207.926.60 0	100%	210.005.8 66	100%	212.105.9 25	100%	630.038.39 1	

				1.04.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0 lapor an	17 Lap		207.926.60 0	17 Lap	210.005.8 66	17 Lap	212.105.9 25	51 laporan	630.038.39 1	
				1.04.01.2.0 5	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	Persentase pegawai yang terlatih	%	0%	100%		87.500.000	100%	87.500.00 0	100%	87.500.00 0	100%	262.500.00 0	
				1.04.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0 Oran g	35 Oran g		87.500.000	35 Oran g	87.500.00 0	35 Oran g	87.500.00 0	35 Orang	262.500.00 0	
				1.04.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran	%	0%	100%		547.027.78 5	100%	563.472.1 39	100%	579.204.9 64	100%	1.689.704. 888	

				1.04.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	13 Paket		35.629.685	13 Paket	37.767.46 6	13 Paket	40.033.51 4	39 Paket	113.430.66 4	
				1.04.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0 Paket	22 Paket		17767542, 98	22 Paket	18833595, 56	22 Paket	19.963.61 1	66 Paket	56.564.750	
				1.04.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	11 Paket		5806756,3 2	11 Paket	6155161,6 99	11 Paket	6.524.471	33 Paket	18.486.389	
				1.04.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	14 Paket		247835000	14 Paket	25357500 0	14 Paket	262.185.0 00	42 Paket	763.595.00 0	
				1.04.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	0 laporan	11 Lap		42582790	11 Lap	45563585, 3	11 Lap	48.753.03 6	33 laporan	136.899.41 2	

							SKPD												
				1.04.01.20 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokume n	0 Dok	13 Dok		7.440.000	12 Dok	7.812.000	12 Dok	7.980.000	37 Dok	23.232.000	
				1.04.01.20 6.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0 Paket	13 Paket		189.966.01 1	13 Paket	193.765.3 31	13 Paket	193.765.3 31	39 Paket	577.496.67 3	
				1.04.01.2.0 7	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	0%	100%		64.100.000	100%	70.510.00 0	100%	77.561.00 0	100%	212.171.00 0	
				1.04.01.2.0 7.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0 Unit	8 Unit		64.100.000	9 Unit	70.510.00 0	10 Unit	77.561.00 0	27 Unit	212.171.00 0	

				5.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Peresentase pemenuhan penunjang urusan PD	%	0%	100%		179.160.00 0	100%	181.560.0 00	100%	182.760.0 00	100%	543.480.00 0	
				1.04.01.20 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0 laporan	24 Lap		96000000	24 Lap	98400000	24 Lap	99600000	72 Lap	294.000.00 0	
				1.04.01.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0 laporan	24 Lap		83160000	24 Lap	83160000	24 Lap	83160000	72 Lap	249.480.00 0	
				1.04.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	0%	100%		288.138.11 4	100%	302.535.9 15	100%	313.209.7 20	100%	903.883.74 9	

				1.04.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0 Unit	30 Unit		107.724.33 0	30 Unit	113.110.5 47	30 Unit	118.766.0 74	30 Unit	339.600.95 0	
				1.04.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0 Unit	1 Unit		18.930.000	1 Unit	18.930.00 0	1 Unit	18.930.00 0	1 Unit	56.790.000	
				1.04.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	1 Unit		80.997.684	1 Unit	85.047.56 8	1 Unit	89.299.94 7	3 Unit	255.345.19 9	

				1.04.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	30 Unit		80.486.100	30 Unit	85.447.80 0	30 Unit	86.213.70 0	90 Unit	252.147.60 0	

Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Matriks Renstra Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur																			
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Tujuan , Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal (2023)	Target Kinerja						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
										2024			2025		2026				
										K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp,
5	6	7	8	9	10		11		12	13	8		14		15		18	20	
Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman	Indeks infrastruktur lingkungan permukiman								57,032	76,88		133.149.802.193	80,438.864	85,342.253	95.064.912.253	85,34	292.890.763.310		
		Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan permukiman	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak						89,47%	89,57%		2.650.000.000	89,67%	2.650.000.000	89,77%	1.850.000.000	89,77%	7.150.000.000	

				1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya penyediaan air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Layak pertahun	%	0%	0,95 %		2.650.000.00	0,95 %	2.650.000.000	0,96 %	1.850.000.000	2,86 %	7.150.000.00	
				1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air bersih	RT/KK	0 RT/KK	400 RT		2.650.000.00	400 RT	2.650.000.000	400 RT	1.850.000.000	1.200 RT/KK	7.150.000.00	
				1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	15 Dok	10 Dok		250.000.000	10 Dok	250.000.000	10 Dok	250.000.000	30 Dok	750.000.000	

				1.03.03.2.01 .0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Det ik	0 SR	400 SR		800.000.00 0	400 SR	800.000.0 00	400 SR	800.000.0 00	1.200 SR	2.400.000.0 00	
				0	0		0	Unit	0 Unit	0 Unit		0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	
				1.03.03.2.01 .0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0 Unit	2 Unit		800.000.00 0	2 Unit	800.000.0 00	1 Unit	400.000.0 00	5 Unit	2.000.000.0 00	
				1.03.03.2.01 .0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0.00 Ha	1.041 SR		800.000.00 0	1.924 SR	800.000.0 00	158 SR	400.000.0 00	3.123 SR	2.000.000.0 00	

			Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak						86,18 %	86,48 %		8.400.000.00	86,78 %	8.500.000.000	87,08 %	8.600.000.000	87,08 %	25.500.000.000	
				1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya pemenuhan sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Sanitasi Yang Terlayani pertahun	%	0,00 %	2,16 %		8.400.000.00	2,21 %	8.500.000.000	2,26 %	8.600.000.000	6,63 %	25.500.000.000	
				1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak	Jumlah Rumah Tangga yang tertangani akses sanitasi	RT/KK	0 RT/KK	1.200 RT		8.400.000.00	1.200 RT	8.500.000.000	1.200 RT	8.600.000.000	3.600 RT/KK	25.500.000.000	
				1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang	Dokumen	0 Dok	4 Dok		350.000.000	4 Dok	350.000.000	4 Dok	350.000.000	12 Dok	1.050.000.000	

							disusun												
				1.03.05.2.01 .0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	0 RT	1.200 RT		7.200.000.00	1.200 RT	7.200.000.000	1.200 RT	7.200.000.000	3.600 RT	21.600.000.000	
				1.03.05.2.01 .0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0 Unit	8 Unit		400.000.000	9 Unit	500.000.000	10 Unit	600.000.000	27 Unit	1.500.000.000	
				1.03.05.2.01 .0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M³/Hari	0 M³	30 M³		450.000.000	30 M³	450.000.000	30 M³	450.000.000	90 M³	1.350.000.000	

			Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik						47,18 %	54,25 %		31.426.949.250	58,04 %	18.561.394.500	66,46 %	51.113.465.200	66,46 %	101.101.808.950	
				1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya jaringan drainase dalam kondisi baik	Persentase Drainase perkotaan Yang Terbangun / Terehabilitasi	%	10,29 %	14,98 %		31.426.949.250	6,98 %	18.561.394.500	14,52 %	51.113.465.200	36,48 %	101.101.808.950	
				1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya panjang drainase yang tertangani	Panjang drainase perkotaan yang terbangun/ terehabilitasi / terpelihara	m	2.500 m	6.128 m		31.426.949.250	2.932 m	18.561.394.500	6.437 m	51.113.465.200	15.496 m	101.101.808.950	

				1.03.06.2.01 .30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	1 Dok	1 Dok		150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	3 Dok	450.000.000	
				1.03.06.2.01 .29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	2.500 m	1.490 m		6.629.010.000	258 m	964.662.000	2.229 m	9.916.821.000	3.977 m	17.510.493.000	
				1.03.06.2.01 .0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan	0 m	4.638 m		24.547.939.250	2.674 m	17.346.732.500	4.208 m	40.946.644.200	11.519 m	82.841.315.950	
				1.03.06.2.01 .0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	M	0 m	0 m	0	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	

				1.03.06.2.01 .23	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokume n	0 Dok	1 Dok		100.000.00 0,00	1 Dok	100.000.0 00	1 Dok	100.000.0 00	3 Dok	300.000.00 0	
			Pesenta se Penanga nan kawasan kumuh						35,72 %	55,77 %		65.175.000. 000	69,24 %	9.425.000. 000	84,85 %	7.925.000. 000	84,85 %	82.525.000. 000	
				1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya penanganan areal kawasan permukiman	Persentase luas wilayah kumuh yang ditetapkan dalam dok RP2KPKPK dan RKP	%	0%	100%		65.175.000. 000	100%	9.425.000. 000	100%	7.925.000. 000	100,0 0%	82.525.000. 000	
				1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan kawasan kumuh	Jumlah dokumen rencana penanganan pengelolaan permukiman kumuh yang ditindaklanjuti	Dokume n	0 dok	1 dok		3.300.000.0 00	1 dok	1.300.000. 000	1 dok	1.300.000. 000	3 dok	5.900.000.0 00	

				1.04.03.2.01 .0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0 Dok	9 Dok		3.000.000.000	4 Dok	1.000.000.000	4 Dok	1.000.000.000	17 Dok	5.000.000.000	
				1.04.03.2.01 .0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	0 laporan	3 Lap		300.000.000	3 Lap	300.000.000	3 Lap	300.000.000	9 laporan	900.000.000	
				1.04.03.2.03	Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga kawasan kumuh yang mendapatkan intervensi pembangunan	RT/KK	0 RT/KK	124 RT		61.875.000.000	124 RT	8.125.000.000	124 RT	6.625.000.000	372 RT/KK	76.625.000.000	

				1.04.03.2.03 .02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	0 Unit Rum ah	0 UM		0	0 UM	0	0 UM	0	0 Unit Ruma h	0	
				1.04.03.2.03 .0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0 Ha	24 Unit		26.175.000. 000	24 Unit	6.625.000. 000	24 Unit	6.625.000. 000	72 Unit	39.425.000. 000	
				1.04.03.2.03 .0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	0 Ha	14 Ha	0	35.700.000. 000	1 Ha	1.500.000. 000	0 Ha	0	15 Ha	37.200.000. 000	

			Persentase rumah layak huni						98,18 %	98,31 %		19.100.000.000	98,43 %	19.100.000.000	98,55 %	19.100.000.000	98,55 %	57.300.000.000	
				1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersfasilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program kab	Presentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	;%	0,00 %	100,0 0%		6.000.000.000	100,0 0%	6.000.000.000	100,0 0%	6.000.000.000	100,0 0%	18.000.000.000	
				1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Tersusunnya dokumen data rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang berada daerah rawan bencana dan relokasi	Jumlah dokumen data rumah di daerah rawan bencana dan relokasi yang tersusun	Dok	0 Dok	1 Dok		500.000.000	1 Dok	500.000.000	1 Dok	500.000.000	3 Dok	1.500.000.000	

				1.04.02.2.01 .0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dok	0 Dok	1 Dok		500.000.00 0	1 Dok	500.000.0 00	1 Dok	500.000.0 00	3 Dok	1.500.000.0 00	
				1.04.02.2.01 .0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dok	0 Dok	0 Dok		0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	
				1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangun , terehabilitasinya rumah korban bencana dan relokasi program Kabupaten	Jumlah rumah korban bencana dan relokasi program Kab yang terehabilitasi	Unit Rumah	0 Unit Rum ah	200 UR		5.500.000.0 00	200 UR	5.500.000. 000	200 UR	5.500.000. 000	600 UR	16.500.000. 000	

				1.04.02.2.03 .01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	0 unit ruma h	100 UR		2.000.000.0 00	100 UR	2.000.000. 000	100 UR	2.000.000. 000	300 UR	6.000.000.0 00	
				1.04.02.2.03 .04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0 unit ruma h	100 UR		3.500.000.0 00	100 UR	3.500.000. 000	100 UR	3.500.000. 000	300 UR	10.500.000. 000	
				1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Persentase RTLH yang telah di bangun	%	0,00 %	6,84 %		11.600.000. 000	7,34 %	11.600.00 0.000	7,93 %	11.600.00 0.000	22,11 %	34.800.000. 000	
				1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses RTLH	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses rumah layak huni	RT	0 RT/K K	500 RT		11.600.000. 000	500 RT	11.600.00 0.000	500 RT	11.600.00 0.000	1.500 RT/K K	34.800.000. 000	

				1.04.04.2.01 .01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	2.462 UR	500 UR		10.000.000. 000	500 UR	10.000.00 0.000	500 UR	10.000.00 0.000	1.500 UR	30.000.000. 000	
				1.04.04.2.01 .0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokume n	3 Dok	3 Dok		1.500.000.0 00	3 Dok	1.500.000. 000	3 Dok	1.500.000. 000	9 Dok	4.500.000.0 00	

				1.04.04.2.01 .0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	1 Lap	1 Lap		100.000.00 0	1 Lap	100.000.0 00	1 Lap	100.000.0 00	3 Lap	300.000.00 0	
				1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase PSU Perumahan yang tertangani	%	0%	7,62 %		1.500.000.0 00	8,25 %	1.500.000. 000	8,99 %	1.500.000. 000	24,86 %	4.500.000.0 00	
				1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Meningkatnya PSU perumahan dalam kondisi baik	Panjang PSU perumahan yang ter rehabilitasi / terpelihara	m	2.942 m	700 m		1.500.000.0 00	700 m	1.500.000. 000	700 m	1.500.000. 000	2.100 m	4.500.000.0 00	

				1.04.05.2.01 .01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokume n	16 Dok	8 Dok		400.000.00	8 Dok	400.000.00	8 Dok	400.000.00	24 Dok	1.200.000.00	
				1.04.05.2.01 .02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	8 Loka si	8 Lokas i		800.000.00	8 Lokas i	800.000.00	8 Lokas i	800.000.00	24 Lokas i	2.400.000.00	

				1.04.05.2.01 .03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	16 laporan	8 Lap		150.000.00 0	8 Lap	150.000.0 00	8 Lap	150.000.0 00	24 laporan	450.000.00 0	
				1.04.05.2.01 .0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	40 dok	15 dok		150.000.00 0	15 dok	150.000.0 00	15 dok	150.000.0 00	45 laporan	450.000.00 0	
									76	69			72		75		75		
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi								47,72	73		6.397.852.943	73	6.439.654.364	73	6.476.447.053	73,00	19.313.954.360	

		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah						80,87	80,87		6.397.852.943	80,87	6.439.654.364	80,87	6.476.447.053	80,22	19.313.954.360	
				1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	%	0%	100%		6.397.852.943	100%	6.439.654.364	100%	6.476.447.053	100,00%	19.313.954.360	
				1.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	%	0%	100%		30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	90.000.000	
				1.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0 Dok	4 Dok		15.000.000	4 Dok	15.000.000	4 Dok	15.000.000	12 Dok	45.000.000	

				1.04.01.1.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokume n	0 Dok	0 Dok		0	0 Dok	0	0 Dok	0	0 Dok	0	
				1.04.01.1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0 lapor an	5 Lap		15.000.000	5 Lap	15.000.00 0	5 Lap	15.000.00 0	15 Lap	45.000.000	
				1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN tepat waktu	%	0%	100%		4.994.000.4 44	100%	4.994.070. 444	100%	4.994.105. 444	100%	14.982.176. 332	

				1.04.01.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0 OB	35 OB		4.600.050.444	35 OB	4.600.050.444	35 OB	4.600.050.444	35 OB	13.800.151.332	
				1.04.01.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0 Dok	12 Dok		388.800.000	12 Dok	388.800.000	12 Dok	388.800.000	36 Dok	1.166.400.000	
				1.04.01.1.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0 laporan	1 Lap		5.150.000	1 Lap	5.220.000	1 Lap	5.255.000	3 laporan	15.625.000	
				1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaporan administrasi barang milik daerah yang tersusun sesuai	%	100%	100%		207.926.600	100%	210.005.866	100%	212.105.925	100%	630.038.391	

							aturan												
				1.04.01.2.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0 lapor an	17 Lap		207.926.60 0	17 Lap	210.005.8 66	17 Lap	212.105.9 25	51 lapora n	630.038.39 1	
				1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas pegawai	Persentase pegawai yang terlatih	%	0%	100%		87.500.000	100%	87.500.00 0	100%	87.500.00 0	100%	262.500.00 0	
				1.04.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0 Oran g	35 Orang		87.500.000	35 Orang	87.500.00 0	35 Orang	87.500.00 0	35 Orang	262.500.00 0	
				1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi umum perkantoran	%	0%	100%		547.027.78 5	100%	563.472.1 39	100%	579.204.9 64	100%	1.689.704.8 88	

				1.04.01.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	13 Paket		35.629.685	13 Paket	37.767.46 6	13 Paket	40.033.51 4	39 Paket	113.430.66 4	
				1.04.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0 Paket	22 Paket		17767542,9 8	22 Paket	18833595, 56	22 Paket	19.963.61 1	66 Paket	56.564.750	
				1.04.01.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	11 Paket		5806756,32	11 Paket	6155161,6 99	11 Paket	6.524.471	33 Paket	18.486.389	
				1.04.01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0 Paket	14 Paket		247835000	14 Paket	25357500 0	14 Paket	262.185.0 00	42 Paket	763.595.00 0	
				1.04.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0 lapor an	11 Lap		42582790	11 Lap	45563585, 3	11 Lap	48.753.03 6	33 lapora n	136.899.41 2	

				1.04.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0 Dok	13 Dok		7.440.000	12 Dok	7.812.000	12 Dok	7.980.000	37 Dok	23.232.000	
				1.04.01.206.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0 Paket	13 Paket		189.966.011	13 Paket	193.765.331	13 Paket	193.765.331	39 Paket	577.496.673	
				1.04.01.2.07	Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	%	0%	100%		64.100.000	100%	70.510.000	100%	77.561.000	100%	212.171.000	
				1.04.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0 Unit	8 Unit		64.100.000	9 Unit	70.510.000	10 Unit	77.561.000	27 Unit	212.171.000	
				5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Peresentase pemenuhan penunjang urusan PD	%	0%	100%		179.160.000	100%	181.560.000	100%	182.760.000	100%	543.480.000	

				1.04.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0 laporan	24 Lap		96000000	24 Lap	98400000	24 Lap	99600000	72 Lap	294.000.000	
				1.04.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0 laporan	24 Lap		83160000	24 Lap	83160000	24 Lap	83160000	72 Lap	249.480.000	
				1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	0%	100%		288.138.114	100%	302.535.915	100%	313.209.720	100%	903.883.749	
				1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0 Unit	30 Unit		107.724.330	30 Unit	113.110.547	30 Unit	118.766.074	90 Unit	339.600.950	

				1.04.01.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0 Unit	1 Unit		18.930.000	1 Unit	18.930.00 0	1 Unit	18.930.00 0	3 Unit	56.790.000	
				1.04.01.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	1 Unit		80.997.684	1 Unit	85.047.56 8	1 Unit	89.299.94 7	3 Unit	255.345.19 9	
				1.04.01.2.09 .10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0 Unit	30 Unit		80.486.100	30 Unit	85.447.80 0	30 Unit	86.213.70 0	90 Unit	252.147.60 0	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui IKU

Dinas Perumahan dan Permukiman menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra. Indikator kinerja (*outcome*) Dinas Perumahan dan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra berdasarkan IKU dapat dipaparkan dalam tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran IKU

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak	86,18%	86,48%	86,78%	87,08%	87,08%
2	Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak	89,47%	89,57%	89,67%	89,77%	89,77%
3	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	47,18%	54,25%	58,04%	66,46%	66,46%
4	Pesentase Penanganan kawasan kumuh	35,72,53%	55,77%	69,24%	84,85%	84,85%
5	Persentase rumah layak huni	98,18%	98,31%	98,43%	98,55%	98,55%

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN JOMBANG

Instansi	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jombang
Visi	: --
Misi	: --
Tujuan	: Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman
Tugas	: Membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Fungsi	1 Perumusan kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2 Melaksanakan kebijakan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4 Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Permukiman; 6 Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan; 7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tabel 7.2 Formula Perhitungan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	1 Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak	$\Sigma \frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan dan Permukiman
		2 Persentase rumah tangga dengan akses air minum yang layak	$\Sigma \frac{\text{Jml. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak}}{\text{Jml. Rumah Tangga} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		3 Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	$\Sigma \frac{\text{Panjang Drainase yang Tertangani}}{\text{Panjang Total Drainase}} \times 100\%$	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
		4 Persentase Rumah Layak Huni	$\Sigma \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Perumahan	
		5 Pesentase Penanganan kawasan kumuh	$\Sigma \frac{\text{Kawasan Kumuh - Kawasan kumuh Tertangani}}{\text{Luas Kawasan Kumuh} + (n+1)} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman	

7.2 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui IKK

Dinas Perumahan dan Permukiman menjabarkan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci (Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra dapat dipaparkan dalam tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang Mengacu pada Indikator Kinerja Kunci

No	IKK (Indikator Kinerja Kunci)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke (%)		
		2024	2025	2026
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	86,48%	86,78%	87,08%
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	89,57%	89,67%	89,77%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kab/ kota yang ditangani	55,77%	69,24%	84,85%
4	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana / relokasi program pemerintah	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026 disusun sesuai dengan amanat Undang–Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Renstra dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang dan disahkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Rencana strategis dimaksud merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026 merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas–tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2024-2026 diharapkan mampu menjadi acuan perencanaan kegiatan disetiap tahunnya.

Jombang, 3 Januari 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kabupaten Jombang



AGUNG HARIADI. ST. MM

Pembina

NIP. 197011262002121006